

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
MENTERI PARIWISATA,
GUBERNUR JAWA TENGAH,
GUBERNUR JAWA TENGAH,
GUBERNUR JAWA TIMUR,
BUPATI GUNUNGKIDUL,
BUPATI GUNUNGKIDUL,
BUPATI HONOGIRI, DAN
BUPATI HONOGIRI, DAN
BUPATI HASIANA,
NOMOR: 03/FJ/45/MEM/2015
NOMOR: 61/27/MPK-A/HK/2015
NOMOR: 120.1/149/012/2015
NOMOR: 120.1/149/012/2015
NOMOR: 1415.4/KB/05/2015
NOMOR: 57/KSB/2015
NOMOR: 546/04/08.12/2015
NOMOR: 546/04/408.12/2015

TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PELESTARIAN GEOPARK GUNUNG SEWU

Pada hari ini Selasa, tanggal Tujuh Belas bulan Februari, tahun Dua Ribu Lima Belas (17-02-2015), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. SUDIRMAN SAID

1. Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, Jalan Merdeka Selatan Nomor 18, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014 - 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

III. ANIES RASYID
BASWEDAN Ph.D

III. ARIEF YAHYA

III. ARIEF YAHY

VI. Dr. H. SOEKARWO

: Gubernur Jawa Timur, berkedudukan di Surabaya Jalan Pahlawan Nomor 110 yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 135/P/Tahun 2013 tanggal 29 November 2013 tentang Pengangkatan Gubernur Jawa Timur masa Jabatan Tahun 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang selanjutnya disebut PIHAK KEENAM.

VII. HJ. BADINGAH

: Bupati Gunungkidul, berkedudukan di Gunungkidul Jalan Brigien Katamso Nomor 12, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131,34-94 Tahun 2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Gunungkidul Menjadi Bupati Gunungkidul, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, yang selanjutnya disebut PIHAK KETUJUH.

VIII H.DANAR RAHMANTO

: Bupati Wonogiri, berkedudukan di Wonogiri Jalan Kabupaten Nomor 4, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131,33-825 Tahun 2010 tanggal 21 Oktober 2010 tentang Pengangkatan Bupati Wonogiri, berkedudukan di Wonogiri Jawa Tengal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Wonogiri, Povinsi Jawa Tengal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Wonogiri, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDELAPAN.

IX. INDARTATO

IS Bupati Pacitan, berkedudukan di Pacitan Jalan Jaksa Agung Suprapton Nomor 8, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131,35-92 Tahun 2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Wonogiri, pang selanjutnya disebut PIHAK KEDELAPAN.

IX. INDARTATO

IS Bupati Pacitan, berkedudukan di Pacitan Jalan Jaksa Agung Suprapton Nomor 8, berdasarkan Reputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131,35-92 Tahun 2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Wangkatan Bupati Wangkatan Bupati Pacitan Pengesahan Pengangkatan Bupati Pacitan Pengesahan Pengangkatan Bupati Pacitan Pengesahan Pengangkatan Bupati Pacitan Pengesahan Pengangkatan Bupati Pacitan Pengesahan Peng

- Berdasarkan:

 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

 2. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Iahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Iahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Iahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Iahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Iahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Iahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Iahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Iahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Iahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Iahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Iahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Iahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Iahun 2007 Iahun 2014 Iahun 2014 Iahun 2007 Iahun 2014 Iahun 2014 Iahun 2014 I

- c. Pengembangan Pariwisata dan Pendidikan;
 d. Pengembangan Paritsipasi Masyarakat;
 e. Pembentukan Lembaga Pengelola;
 f. Pendampingan, Pelcitana dan Sosialisasi;
 g. Pengembangan, Pelcitarian, Perlindungan dan Konservasi
 h. Hal-hal lain yang disepakati PARA PIHAK.

 Pasal 4
 PELAKSANAN

 (1) Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama oleh PARA PIHAK sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

 (2) PARA PIHAK akan menugaskan wakil-wakilnya sebagai pelaksana teknis sesuai dengan fungsi, tugas, dan kebutuhan yang diperlukan untuk mempermudah dan memperlancar pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

 (3) Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

 Pasal 5
 PEMBIAYAAN

 Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan pada:
 a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah;
 d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah;
 d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah;
 d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gunungkidul;
 f. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pacitan;
 h. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

 Pasal 6
 JANGKA WAKTU

 Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7 PENUTUP

NEX CERTA SECTION CONTRACTOR TO SECTION CONT

Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku pada hari dan tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK, dibuat dalam rangkap 9 (sembilan), bermeterai cukup untuk PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM, PIHAK KETUJUH, PIHAK KEDELAPAN dan PIHAK KESEMBILAN.



SHICH HORICERICERICERICERICERICER

1248/CF477 18099

ARIEF YAHYA



METERAL ENGINEERS OF THE PROPERTY OF THE PROPE

THE RASYD BASWEDAN Ph.D

PIHAK KESATU



SUDIRMAN SAID

PIHAK KEENAM

PIHAK KELIMA

PIHAK KEEMPAT



Dr. H. SOEKARWO

METERAN TEMPER 48A73ACB4763D1941111 DOM ANATYMEROPIAN COOO DVP

AWA HE GANJAR PRANOWO

METERAL TEMPEL

17883ACF433 524 1 C 1 96

6000 DJP

JAR PRANOWO HAMENGKU BUWONO X

PIHAK KESEMBILAN



SELECTERIC SELECTION CONTROL C

PIHAK KEDELAPAN



H. DANAR RAHMANTO

RELIGIES LA SESTA SE LA SESTA SESTA SE LA SESTA SESTA SESTA SE LA SESTA SESTA SESTA SE LA SESTA SESTA

HJ. BADINGAH